

TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK

Dinamika Politik Memasuki Tahun 2014¹*Philips J. Vermonte*

Tahun 2013 seringkali dianggap sebagai prolog dari "tahun politik" 2014. Terjadi satu fenomena tidak lazim dalam dunia politik pada tahun 2013 ketika partai-partai politik memasang iklan di media dalam rangka mencari kandidat yang sesuai untuk pemilihan parlemen. Selain itu, partai-partai juga terburu-buru dalam menjalankan proses rekrutmen para kandidat agar bisa memenuhi tenggat waktu pengajuan nama yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut hemat penulis, ini adalah salah satu gejala disfungsi partai politik Indonesia. Proses rekrutmen dan program pelatihan partai merupakan indikator akan seberapa baiknya fungsi suatu partai politik. Seusai pemilu, partai harus segera siap dengan proses rekrutmen agar bisa memulai semua proses politik internal sesegera mungkin. Dengan demikian, ketika partai pemenang berkonsolidasi, kandidat yang kalah dalam pemilu akan dapat kembali menguat dengan cepat. Tetapi yang kami lihat dalam iklan-iklan di media justru memperkuat citra yang banyak dipegang masyarakat bahwa

¹ Tulisan ini aslinya berjudul "Approaching 2014: Some Problems to Watch". Oleh Redaksi dirubah menjadi judul "Dinamika Politik Memasuki Tahun 2014", yang diterjemahkan oleh Dalia R.S. Kuwatly, intern CSIS.

politisi atau anggota partai politik hanyalah pegawai biasa. Politisi tidak lagi dianggap sebagai individu yang berkedudukan lebih tinggi dan politik kemudian menjadi ajang dimana orang adil dan 'benar' enggan terlibat didalamnya.

Tidak mengherankan bahwa hingga tahun lalu sentimen anti-politik cukup tinggi. Survei CSIS pada bulan Juni tahun lalu (2012) mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen responden beranggapan bahwa partai politik telah bekerja dengan buruk atau sangat buruk. Evaluasi pemilih tentang kinerja partai berfungsi sebagai indikator akan lemahnya kelembagaan politik Indonesia. Partai politik kerap lebih mengandalkan peran tokoh dibandingkan mekanisme politik mereka. Saya berpendapat bahwa ketidakmampuan partai politik untuk melaksanakan mekanisme perekrutan secara rutin merupakan salah satu akar penyebab dari semua masalah politik yang dihadapi Indonesia saat ini.

Partai-partai bukan dibangun pada prinsip-prinsip ideologis, tetapi diselenggarakan sepanjang garis pragmatisme. Akibatnya, pemilih tidak bisa membedakan antara satu partai dengan yang lain sehingga terjadi sentimen anti-partai yang berkepanjangan. Pragmatisme sampai batas tertentu memang diperlukan dalam politik, namun secara ironis norma baru pragmatisme ini tidak memungkinkan penerapan kebijakan publik yang baik, walaupun itu yang seharusnya terjadi. Korupsi terus merajalela sampai tingkat yang tidak lagi bisa ditoleransi oleh publik. Berbagai survei tentang opini publik telah mengungkapkan bahwa partai politik dan badan parlemen dianggap sebagai lembaga-lembaga terkorup di negeri ini.

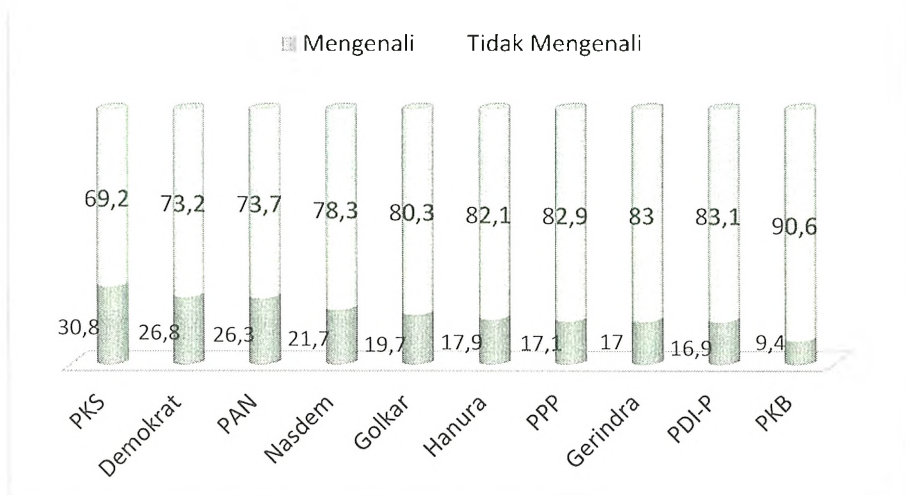
DUA FUNGSI UTAMA PARA PEMBUAT UNDANG-UNDANG

Ada dua fungsi dasar yang harus dipenuhi partai politik melalui wakil mereka (anggota parlemen) yang berkedudukan di DPR: fungsi legislasi dan representasi. Kedua fungsi tersebut dapat dijadikan sebagai patokan untuk mengevaluasi kinerja anggota parlemen di tahun 2013. Pada sisi legislasi, tahun ini DPR hanya bisa meresmikan tujuh undang-undang, jauh dari target 70 undang-undang yang ditentukan oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk tahun 2013. Kejadian ini mengulang kinerja legislatif buruk yang telah

terjadi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2010, DPR hanya bisa meresmikan delapan undang-undang, sementara pada tahun 2011, dari 93 yang direncanakan hanya 18 yang berhasil diresmikan. Tahun lalu, DPR hanya bisa meresmikan 10 dari 64 undang-undang yang direncanakan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas pembuatan hukum yang dimiliki parlemen, yang menurut penulis kembali terkait ke proses rekrutmen dan mekanisme pelatihan yang lemah dalam tiap partai politik.

Dari sisi representasi, pemilih beranggapan bahwa anggota parlemen juga memiliki kekurangan. Survei terbaru CSIS yang dirilis ke publik pada bulan November 2013 menunjukkan bahwa 81 persen dari konstituen tidak tahu atau tidak mengenali anggota parlemen dari daerah pemilihan (dapil) mereka. Meskipun demikian, survei menunjukkan suatu fakta menarik yang menyatakan bahwa pemilih PKS relatif paling 'berpengetahuan' tentang anggota parlemen dari dapil mereka dibandingkan dengan pemilih partai politik lain. Jumlah pemilih PKS yang tahu anggota parlemen mereka (terlepas dari partai afiliasi anggota parlemen tersebut) lebih tinggi dari partai politik lainnya: 30,8 dari pemilih PKS tahu anggota parlemen dapil mereka, diikuti oleh pemilih Partai Demokrat (26,8 persen) dan PAN (26,3 persen). Hasil ditunjukkan di gambar berikut.

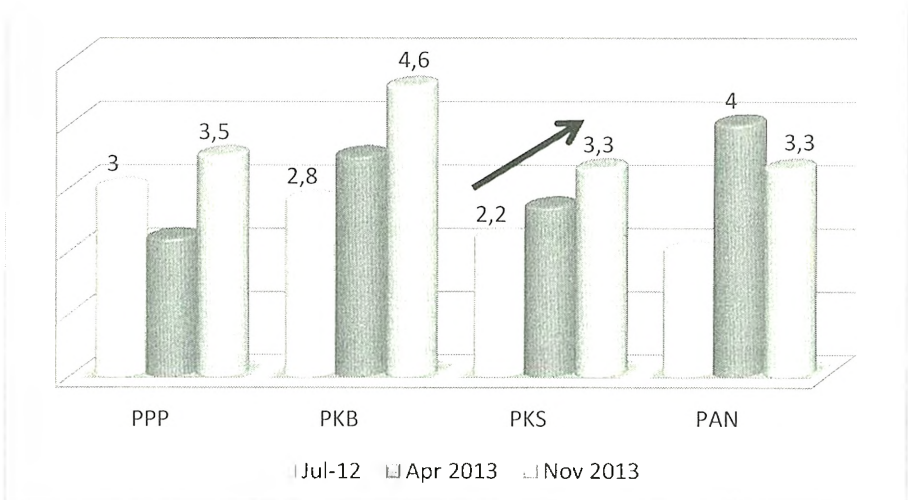
Gambar 1. Pemilih Partai Yang Mengenali Wakil Rakyat Mereka



Jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan partai-partai lama, seperti PDI-P, Golkar dan PPP. Hal ini menarik karena PKS, Demokrat dan PAN adalah partai-partai baru yang terbentuk setelah jatuhnya Suharto. Pengamatan lebih lanjut dibutuhkan untuk menentukan apakah kami sedang menyaksikan generasi baru pemilih yang lebih berkelas dan rasional. Setidaknya, upah dari kerja keras kami dalam mereformasi sistem partai politik sudah mulai terlihat.

Salah satu perkembangan menarik dalam tiga bulan terakhir adalah adanya indikasi bahwa dukungan untuk partai-partai Islam bertambah, terutama PKB dan PKS (Gambar 1 dibawah menunjukkan perbandingan tiga survei CSIS pada bulan Juli 2012, Mei 2013, dan November 2013). Berbeda dengan partai politik lainnya, PKB dan PKS belum menemukan "bintang politik" atau tokoh yang dapat menarik dukungan pemilih. Masih perlu diamati apakah kenaikan dukungan untuk kedua partai tersebut merupakan hasil kinerja baik pemilu dari tingkat bawah.

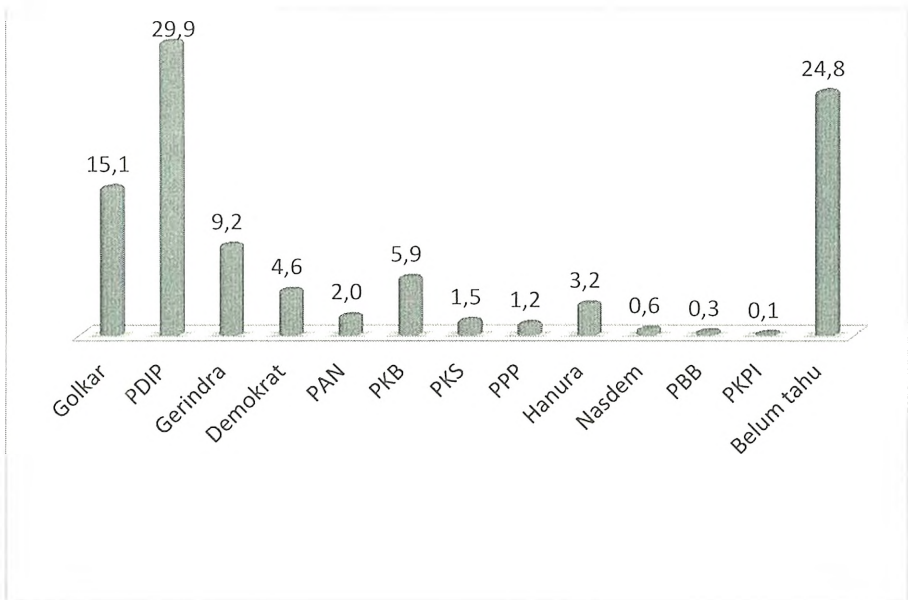
Gambar 2. Dukungan untuk Partai Islam



Namun demikian, perlu terus dilihat *coattail effect* atau efek ikut jejak dari bagaimana pemilih mengungkapkan preferensi mereka. Tokoh yang kuat dan populer menjadi faktor utama dibelakang jumlah suara yang didapati partai, bukan faktor sistemik dan organik

pemilihan. Sementara, mendekati Pemilu 2014, "efek Jokowi" terlihat semakin jelas. Survei CSIS pada bulan November 2013 menunjukkan bahwa apabila pemilu dilaksanakan pada saat itu juga, PDIP akan memimpin. PDIP mendapat 17,6 persen suara, diikuti oleh Golkar dengan 14,8 persen, Gerindra dengan 8,6 persen, dan Partai Demokrat dengan 7 persen. Diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 3. Suara yang didapatkan partai jika Jokowi menduduki kotak suara²

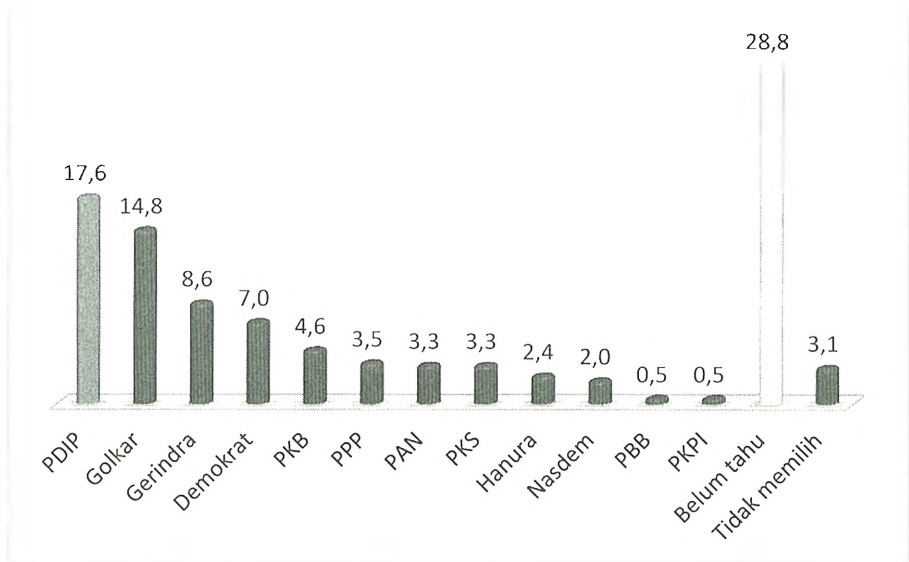


PDIP tentu meraup keuntungan dari popularitas Gubernur DKI Jakarta tersebut. Jika nama Jokowi tercantum pada kotak suara, survei CSIS menunjukkan bahwa jumlah suara yang akan diperoleh PDIP akan meningkat hampir dua kali lipat: 29,9 persen, jauh melebihi jumlah suara Golkar (15,1 persen), Gerindra (9,2 persen), dan Partai Demokrat (4,6 persen). Jokowi tentu akan meningkatkan jumlah suara

² Pertanyaan adalah: "Jika Golkar memajukan Aburizal Bakrie, PDI-P Jokowi, Gerindra Prabowo Subianto, dan Demokrat Pramono Edhie Wibowo, partai apa yang akan Anda pilih apabila pemilu diadakan hari ini?"

pemilih PDIP apabila namanya tercantum di kotak suara. Gambar 3. menunjukkan jumlah suara "asli" yang didapatkan partai tanpa menyebutkan nama kandidat.

Gambar 4. Jumlah Suara Partai Politik berdasarkan Survei CSIS November 2013³



Hal ini tentu menciptakan prospek yang baik untuk politik "eksperimentasi" PDIP. Jika PDIP memenangkan suara sejumlah 29,9 persen, prospek untuk mencapai jumlah minimal kemenangan sudah jelas, melampaui minimal 25 persen kebutuhan suara untuk mencalonkan diri sebagai presiden. PDIP tidak perlu membentuk koalisi untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Akibatnya, jika memenangkan pemilu, PDIP dapat membentuk kabinet pemerintahan tanpa harus mengakomodasikan tekanan dari pihak lain yang berniat untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara menduduki kursi kabinet.

Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalah pada tekanan di tahun 2009, meski ia menang secara mutlak

³ Pertanyaan adalah: "Partai apa yang akan Anda pilih apabila pemilu diadakan hari ini?"

dalam pemilihan presiden. SBY memilih untuk melakukan “koalisi kemenangan-maksimal” dan mengikutsertakan representatif dari hampir semua partai politik dalam kabinetnya. Namun demikian, terlihat bahwa teknik “koalisi kemenangan-maksimal” ini tidak efektif dan Presiden SBY telah gagal dalam menjalankan sejumlah kebijakannya.

Dalam hal ini PDIP telah menunjukkan suatu pelajaran penting dalam politik, yaitu: menjadi partai oposisi adalah suatu hal yang baik dan tidak akan mengurangi kekuasaan politik. Sekarang PDIP sedang menikmati upah dari keputusan mereka untuk menjadi partai oposisi dalam dua siklus pemilu dari tahun 2004 sampai 2014.

Tahun 2013 mungkin adalah saat yang tepat bagi PDIP. Dari pengalaman beberapa tahun terakhir ini, PDIP hampir memenangkan, dan akhirnya memenangkan, beberapa pilkada penting dan strategis. Di provinsi Jawa Barat, kandidat PDIP Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki menduduki posisi kedua dengan selisih angka kecil melawan penguasa yang kuat. Hal yang sama terjadi setelah pemilihan gubernur Jawa Barat. Dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara, kandidat dari PDIP juga menduduki posisi kedua. Ini juga terjadi dalam pemilihan gubernur di Bali. Terakhir, PDIP memenangkan pemilihan gubernur di provinsi Jawa Tengah. Provinsi-provinsi tersebut penting dalam konteks pemilu nasional karena menempati daerah padat penduduk dan memiliki sejumlah besar kursi yang tersedia dalam pemilihan parlemen 2014 mendatang. Pengalaman di keempat provinsi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme PDIP bekerja dengan baik dan relatif lebih teratur dibandingkan partai politik lainnya.

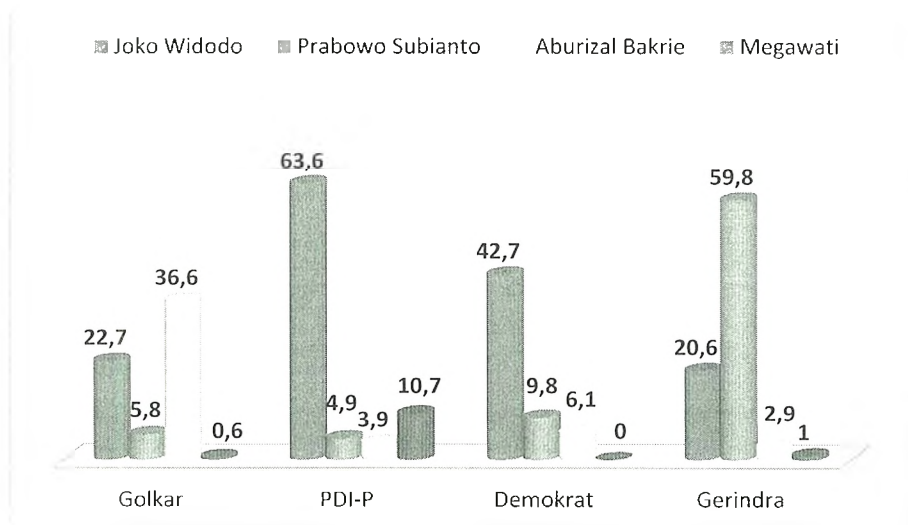
PEMILU PRESIDEN 2014

Ada kemungkinan besar bahwa PDIP akan memberi pelajaran politik untuk negara ini melalui koalisi kemenangan-minimal apabila Jokowi terpilih sebagai presiden. Ini dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan yang dipilih oleh pemenang pemilu. Yang dibutuhkan sekarang adalah bagi kandidat yang kalah untuk bisa memasuki peran oposisi yang selama sepuluh tahun terakhir telah diduduki oleh PDIP.

Sayangnya, nasib pencalonan Jokowi sebagai presiden terletak dalam tangan sejumlah kecil individu dalam lingkaran elite PDIP. Data terbaru dari survei CSIS pada bulan November 2013 menunjukkan bahwa terdapat arus kuat dukungan untuk Gubernur DKI Jakarta. Survei tersebut mengungkapkan bahwa, dibandingkan survei bulan Mei 2013, dukungan untuk Jokowi telah meningkat sebanyak enam persen, sementara dukungan untuk kandidat presiden lain terlihat menurun. Hanya Aburizal Bakrie dari Golkar dan Wiranto dari Partai Hanura mampu memperkuat basis dukungan mereka. Survei juga menemukan bahwa sejak Mei 2013 terdapat peningkatan suara sebanyak dua persen untuk Aburizal Bakrie dan 3,8 persen untuk Wiranto. Pesaing terkuat Jokowi untuk saat ini adalah Prabowo Subianto, mantan jenderal militer yang dukungannya mulai berkurang setelah pemilihan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun lalu.

Jokowi telah mampu meningkatkan jumlah pendukung dan berhasil menggalang dukungan dari berbagai kalangan. Survei CSIS pada bulan November 2013 menemukan bahwa sumber utama dukungan Jokowi datang dari pendukung PDIP. Sekitar 64 persen responden yang menyatakan dukungan untuk PDIP mengatakan

Gambar 5. Preferensi Pendukung Partai Besar dalam Pemilihan Presiden



bahwa mereka akan memilih Jokowi sebagai presiden. Sementara itu, 42,7 persen dari pendukung Partai Demokrat juga menyatakan bahwa mereka akan memilih Jokowi. Adapun Golkar dan Gerindra, jumlah pendukung mereka yang beralih ke Jokowi adalah 23 dan 21 persen masing-masing.

Sementara itu, jika dilihat Jokowi dari pendukung partai politik lain, jumlah dukungan yang didapat Jokowi dari pemilih PDIP di survei sebelumnya hanya 52 persen, sementara dukungan yang diperoleh dari pemilih Gerindra untuk Jokowi meningkat dari 13 persen hingga 21 persen. Ini berarti beberapa pendukung Prabowo telah beralih ke Jokowi. Singkatnya, semakin dekat menjelang Pemilu 2014, semakin luas kesenjangan yang terlihat antara pemilih Jokowi dan calon presiden lainnya.

Namun demikian, fokus tulisan ini bukan hanya pada Jokowi. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pesaing-pesaing dalam pemilihan presiden mendatang, yang pada akhirnya berkisar seputar “kepemilikan” partai. Prabowo dan Wiranto, misalnya, adalah pendiri dan pemilik partainya masing-masing. Mereka merupakan tokoh yang berkuasa atas partai politik, tidak seperti Jokowi. Jokowi hanya anggota partai biasa dari PDIP. Dengan tingkat dukungan publik yang tinggi, bisa dikatakan bahwa Jokowi mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, baik dari anggota elite maupun non-elite pemilih di Indonesia.

Dalam hal konsolidasi demokrasi, fenomena ini memberi indikasi kecil bahwa praktik oligarki partai politik sudah berangsur hilang. Indonesia telah memulai proses demokratisasi dan berbagai inisiatif reformasi sudah terjadi sejak tahun 1999. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah kembali ke barak mereka karena reformasi politik telah merampas fungsi ganda sosial dan politik mereka. Pers di Indonesia dewasa ini adalah salah satu yang paling bebas di dunia, sesuatu yang tidak akan tercapai pada masa Orde Baru. Reformasi juga telah membawa sejumlah pemain bisnis baru, yang sebelumnya dikontrol ketat oleh sejumlah kecil elite, yaitu konglomerat. Perekonomian negara masih dikendalikan oleh beberapa konglomerat tertentu, tetapi hambatan masuk tidak setinggi sebelumnya.

Namun satu isu yang belum didiskusikan adalah hal dimana semua proses politik dimulai: cara operasional partai politik Indonesia yang belum berubah. Proses pengambilan keputusan dalam partai terus dikontrol oleh lingkaran kecil yang terdiri dari beberapa individu berkuasa, yaitu oligarki partai. Kekuasaan untuk mengajukan calon terletak dalam lingkaran kecil ini.

PDIP merupakan ujian akan demokrasi Indonesia dengan adanya Jokowi untuk merubah pola umum politik. PDIP bahkan telah mengajarkan suatu pelajaran penting bagi Indonesia dalam hal politik elektoral. PDIP menunjukkan bahwa berada di luar kawasan kekuasaan selama dua siklus pemilu—dengan kalah dalam pemilu 2004 dan 2009—tidak berarti partai harus stagnan. Sebaliknya, PDIP telah menunjukkan bahwa menjadi partai oposisi adalah norma baru dan bahwa partai bisa pada akhirnya mengambil kembali kekuasaan. Itulah dasar politik elektoral: jika suatu partai kalah dalam pemilu, susun kembali, fokus kembali, dan lakukan pekerjaan rumah politik.

PDIP menikmati upah hasil tekad yang kuat untuk menjadi partai oposisi selama sepuluh tahun. Dewasa ini partai tersebut menonjolkan kebanggaannya akan kader-kader muda dan cermat yang memegang berbagai posisi penting dalam publik. Sebagai contoh: Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Tri Rismarini sebagai Walikota Surabaya, provinsi Jawa Timur. Hal ini, menurut penulis adalah hasil dari keputusan tegas kepemimpinan PDIP untuk tidak bergabung dengan “koalisi kemenangan-maksimal” yang dibentuk oleh Presiden SBY dan akibatnya, PDIP dan Jokowi sekarang dapat memosisikan diri sebagai alternatif dari partai berkuasa dan anggota koalisi partai.

Secara ironis, walaupun Jokowi mendapat dukungan besar dari masyarakat di luar kaum elite PDIP, namanya tetap tidak akan berada di kotak suara jika kaum elite partai memutuskan untuk tidak mencalonkan Jokowi. Jokowi merupakan studi kasus, apakah kekuasaan kaum elite bertepatan dengan suara rakyat, sesuai halnya demokrasi. Jika tidak ada jalan tengah, akan terjadi pemutusan antara hubungan kaum elite dengan masyarakat dan oligarki partai di PDIP maupun partai lain. PDIP memiliki kesempatan untuk mengajarkan Indonesia suatu pelajaran penting yang lain.

Di luar PDIP, indikasi lain bahwa dominasi oligarki partai runtuh juga dapat dilihat. Konvensi Partai Demokrat menunjukkan penyambutan unsur demokrasi dalam partai dan membuka kemungkinan untuk tokoh-tokoh di luar kaum elite partai. Walaupun banyak kritik menyerang motif dibalik keputusan untuk mengadakan konvensi tersebut, penulis berpendapat bahwa inti dari konvensi bukanlah motif dibalik kaum elite partai. Yang menjadi fokus justru adalah dampak dari konvensi ini membawa perubahan terhadap politik Indonesia. Yaitu, harapannya semua partai akan menemukan cara untuk memilih calon presiden dengan proses terbuka.

Oleh karena itu, sebuah "keretakan" dalam dinding oligarki harus didorong lebih jauh agar dapat dihancurkan oleh generasi politik berikutnya. Bangsa kian menunggu perubahan dan pemilih terus mengamati. Mungkin ini merupakan tantangan terbesar bagi masa depan demokrasi. Ironisnya, yang belum dilaksanakan sejak masa reformasi politik tahun 1998 adalah untuk mendemokrasikan secara internal partai politik. Kaum elite dan oligarki partai mengontrol partai politik Indonesia secara ketat. Karena itu semua partai politik Indonesia, tidak hanya PDIP, belum menjadi sarana demokrasi.

Sebuah kutipan dari Hilary Clinton sangat relevan di sini. Dalam pidato konsesi tahun 2008 saat ia kehilangan basis dari Partai Demokrat yang beralih ke Barrack Obama. Clinton fasih menjelaskan kepada 18 juta pendukungnya—yang mayoritas perempuan—atas perkelahian heroiknya dalam proses politik yang didominasi laki-laki, menyebutkan bahwa "Although we were not able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you, it's got about 18 million cracks in it.... The path will be easier next time"⁴.

⁴ "Meskipun kami tidak mampu menghancurkan batas tertinggi saat ini, Anda semua memungkinkan batasan itu untuk memiliki sekitar 18 juta retakan di dalamnya Jalan itu akan lebih mudah ditempuh di masa depan"